

Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tambun Selatan

Raras Ramadhani

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: Rarasramadhani25@gmail.com

Abstrak

Era yang modern, era global, berteknologi tinggi, serba digital, yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan telah mendorong manusia seperti mesin yang tidak punya hati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memedulikan lingkungan sekitarnya, dan justru dipenuhi oleh ketidakjujuran, manipulasi, kekerasan, saling sikut, dan tidak punya hati nurani. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikemas dengan muatan yang berperspektif integritas. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif, kreatif, pengembang *skill*, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokoh moral dan spiritual. Pendidikan harus diarahkan dan dikelola dengan tujuan yang jelas, yaitu mampu mengembangkan nilai-nilai positif pada peserta didik. Melalui pendidikan, harus dapat memunculkan sosok-sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh dan teruji, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang kemanusiaan. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pendidikan antikorupsi sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah akan menjadi tempat penyemaian budaya kejujuran. Bukan hanya melahirkan generasi penerus yang pandai secara intelektual, emosional, dan spiritual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan, hendaknya dimulai dari lembaga yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Demikian juga di satuan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan berperan aktif mencegah korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak utama dalam gerakan antikorupsi di masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Satuan Pembelajaran Berkarakter.

Abstract

The modern era, the global era, high technology, all digital, which is marked by the development of science has pushed humans like machines that have no heart, have no sense of humanity, do not care about the surrounding environment, and are instead filled with dishonesty, manipulation, violence, elbow each other, and have no conscience. Therefore, education must be packaged with an integrity perspective. Education should not be interpreted as an activity or teaching and learning activity in the classroom. Education must refer to various processes and activities that must be productive, creative, skill development, personality, integration, excellence, to moral and spiritual reinforcement. Education must be directed and managed with a clear goal, namely being able to develop positive values in students. Through education, it must be able to bring up figures who have strong and tested characters and personalities, both in the scientific field and in the humanitarian

field. In addition to being part of the process of forming students' morals, anti-corruption education is expected to be the main foundation in the formation of an honest identity with the Pancasila paradigm and the 1945 Constitution in accordance with Law no. 20, 2003 concerning the National Education System. If anti-corruption education has become an orientation and learning goal, of course, schools will become places for seeding a culture of honesty. Not only giving birth to the next generation who are intellectually, emotionally, and spiritually intelligent, but also have a personality with character, integrity, and responsibility. Efforts to eradicate corruption cannot be completed instantly, it should start from the institution, namely the learning process in educational institutions. Likewise in higher education units, universities and students are expected to play an active role in preventing corruption by acting as agents of change and the main driving force in the anti-corruption movement in society.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Character Learning Unit.*

PENDAHULUAN

Dalam era global, tantangan terbesar justru muncul bukan dari eksternal, melainkan internal. Bangsa kita sekarang umumnya dalam keadaan sakit secara mental karena masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan mentalitas buruk. Bangsa yang sudah dilimpahi kekayaan alam dan keadaan geografis yang nyaman justru menjadi porakporanda karena adanya kasus korupsi yang berakibat kemiskinan, pencurian hak intelektual, banalitas atau kekerasan, perampasan milik rakyat kecil, dan tindakan lain. Indonesia sudah tercatat sebagai bangsa terkorup di kawasan Asia.

Terjadi suatu lingkaran yang saling bertalian, yaitu karena pejabatnya tidak jujur (korup), penegak hukumnya tidak adil, rakyatnya tidak produktif, karyawan tidak loyal, rakyatnya tidak bisa kerja sama, masyarakat tidak memiliki empati, tidak mempunyai keteguhan hati dan komitmen, pelajar dan mahasiswanya tawuran, dsb. Semua fenomena di atas memiliki factor penyebab utama yaitu masalah nilai moral. Nilai moral sudah tergerus dan tidak teridentifikasi dalam bangsa kita.

Pendidikan nilai moral/agama sangat penting bagi tegaknya suatu bangsa. Tanpa pendidikan moral (agama, budi pekerti, pendidikan antikorupsi) kemungkinan besar suatu bangsa bisa hancur dan hilang. Di Indonesia, kemerosotan nilai moral telah menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak mulai lembaga pendidikan, orang tua, negara, sampai lembaga kemasyarakatan lain untuk segera memandang pentingnya sebuah sinergi bagi pengembangan pendidikan antikorupsi. Berbagai macam persoalan yang melanda bangsa membuat kita harus berpikir keras dan duduk bersama untuk menemukan obat mujarab bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Media yang paling ampuh untuk mengubah mentalitas bangsa adalah lewat pendidikan dan keyakinan agama. Pendidikan yang mampu mengubah mentalitas adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya sekadar formalitas atau kepura-puraan.

Dunia pendidikan harus mengakui begitu pentingnya dan perlunya kembali kepada pendidikan moral yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga mereka menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, usaha ini pun hanya terjadi secara tersebar, tidak serentak. Selain itu, tampaknya ada ketidaksepahaman tentang kepentingan pendidikan antikorupsi yang digagas melalui bentuk satuan pembelajaran di sekolah.

Satuan pendidikan dengan tugas utama mendidik peserta didik menjadi manusia yang cerdas baik secara intelektual, mental, maupun spiritual, dalam realitasnya belum sepenuhnya mampu mewujudkan tugasnya tersebut. Ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, pemalas, mudah putus asa, bergaya hidup mewah/perilaku konsumtif, penakut, masa bodoh, pengumpulan tugas tidak

tepat waktu, dan masih suka pilih kasih, masih sering terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah, yang seharusnya memberi teladan justru kurang memberikan keteladanan, justru menciptakan mekanisme yang curang, tidak jujur demi tercapainya kognitif siswa semata, misalnya kebocoran soal ujian, membiarkan siswa saling bekerjasama pada saat ujian. Ketidaksiplinan juga sering terjadi pada tenaga pendidiknya / guru, misalnya terlambat hadir di sekolah, masuk dan keluar ruang kelas tidak sesuai waktu yang ditentukan. Belum tercapainya tujuan pendidikan tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya kesamaan visi semua komponen sekolah, keterbatasan sarana prasarana, belum bakunya dan lengkapnya sistem evaluasi, dalam membiasakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di sekolah.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu masalah dibahas dengan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Zulfandi (2007) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian (person, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada masa kini dengan mengacu pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan karakteristik metode deskriptif dalam penelitian ini:

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) dan masalah yang aktual.
- 2) Menggambarkan fakta yang memiliki relevansi yang erat dengan permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, konkret, faktual, tanpa diintervensi oleh pendapat pribadi.

Agar penggunaan metode dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan berhasil guna, metode deskriptif diaplikasikan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan survei, dan studi perkembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran yang Berkarakter

Jika kita mengerucutkan pemaknaan pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran hanya cocok bagi para siswa, tetapi bukan bagi kita, para guru, staf, karyawan, orang tua, pegawai, dll, yang secara usia dan pengalaman, katakanlah, tidak muda usia lagi dan sudah cukup berpengalaman. Satuan pembelajaran pada masa lalu bisa mengacu pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini biasanya mengacu pada pendidikan moral.

Pendidikan moral inilah yang dapat mengantarkan dan membimbing mereka memasuki tahap kehidupan orang dewasa. Pada kenyataannya, usia dan matangnya pengalaman tidak senantiasa berbanding lurus dengan pertumbuhan perkembangan hidup moral seseorang. Banyak bukti dalam masyarakat kita menunjukkan bahwa usia bukanlah jaminan bahwa seseorang memiliki hidup moral yang integral. Maraknya kejahatan, pelanggaran dari pelecehan hak asasi manusia, ketidakjujuran struktural lewat perilaku koruptif, dll, hanyalah salah satu contoh orang yang katakanlah telah dewasa tidak memiliki kehidupan moral yang integral.

Dalam konteks ini, jika satuan pembelajaran yang berkarakter dipahami sebagai sebuah proses perkembangan terus-menerus seorang individu dalam menyempurnakan keberadaan dirinya sebagai makhluk yang bermoral, setiap kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan moralnya sangatlah relevan bagi dirinya. Untuk itu, kaum dewasa pun masih tetap membutuhkan sebuah satuan pembelajaran berkarakter khas. Satuan pembelajaran ini bukanlah sebuah aset yang bisa otomatis dimiliki, melainkan sebuah kemungkinan yang terbuka di mana setiap individu merangkai, membangun, dan membentuk karakter individualnya sesuai dengan kemungkinan yang terbuka di hadapannya secara dinamis.

Satuan pembelajaran berkarakter dipakai juga untuk mengacu pada sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, teori, dan aplikasi. Dalam bahasa Indonesia, kata satuan pembelajaran berkarakter mengacu pada berbagai macam proses mengacu pada proses pendidikan di sekolah yang memiliki hubungan interaktif, humanis, dan saling membutuhkan antara guru dan murid.

2. Evaluasi Pendidikan Antikorupsi

Cara evaluasi pendidikan antikorupsi seperti evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan antikorupsi dalam setiap individu, juga bisa dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas sekolah. Pada dasarnya, apa yang dilakukan individu akan memengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap ini bukan hanya sebuah prestasi bagi siswa sebagai individu, tetapi juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan. Apa yang dilakukan individu memiliki makna dan berpengaruh bagi perkembangan sekolah. Inilah prinsip dasar pendidikan antikorupsi di sekolah.

Evaluasi pendidikan antikorupsi di atas sebenarnya masih memiliki sudut pandang yang sifatnya kuratif-negatif, dalam arti, pendidikan antikorupsi dinilai dari kriteria berkurangnya perilaku buruk yang terjadi dalam sekolah atau berkurangnya ketidakdisiplinan dan dalam diri siswa di dalam kegiatan sekolah. Misalnya, kriteria tentang jumlah siswa yang tidak bolos, tidak terlibat tindak kejahatan, narkoba, tidak lulus/tidak naik kelas, tidak terlibat tawuran pelajar, tidak mencontek, tidak terlambat menyerahkan tugas, dll, yang semuanya dimulai dengan kata kunci "tidak".

Evaluasi seperti ini, sesungguhnya baru merupakan langkah awal sebab penghayatan nilai bukan semata-mata memiliki unsur kuratif, melainkan juga secara positif mampu meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Kalau di sekolah tidak ada lagi yang membolos, tidak ada lagi yang terlibat tawuran pelajar, tidak ada lagi yang terlambat menyerahkan tugas, tidak ada lagi yang tidak naik kelas, tidak ada lagi yang menyontek, kriteria apa yang bisa kita pakai untuk menilai keberhasilan pendidikan antikorupsi? Kriteria ini tidak lain adalah kreativitas, yaitu inisiatif yang akan tampil secara keseluruhan performa yang dimiliki sekolah yang lazim kita sebut sebagai prestasi. Sekolah yang berprestasi pasti mampu mengatasi persoalan seputar perilaku tidak disiplin dan tidak jujur dalam diri siswa dan semakin mengarahkan diri siswa kepada hal positif yang semakin menyempurnakan kinerja pendidikan.

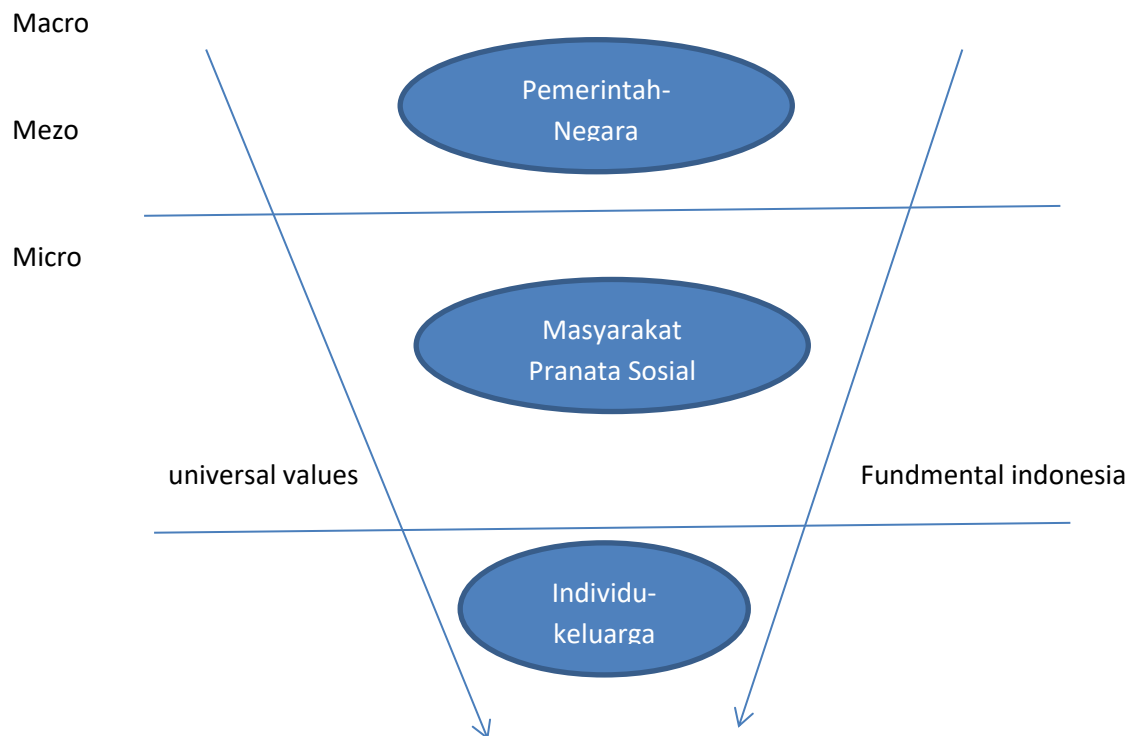
3. Implementasi, Desain, dan Strategi Pendidikan Antikorupsi

A. Desain Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Kurikulum Formal	Kurikulum Operasional	Kurikulum yang Tersirat
Memuat seperangkat norma, <i>subject matter</i> dijadikan rujukan makro nasional	Implementasi kurikulum di sekolah ke dalam proses pembelajaran di kelas	Memuat nilai-nilai moral, etika filosofis yang menjadi landasan mencapai keberhasilan dalam menempuh kehidupan
Dikembangkan oleh pakar dan birokrat pendidikan	Dikembangkan oleh guru sesuai dengan kondisi kekinian dan	Dikembangkan oleh guru sesuai dengan spirit, etos kerja dan

	kebutuhan belajar siswa	idealism guru
--	-------------------------	---------------

Penyemaian dan Pengembangan Pendidikan Antikorupsi



Academic code of Ethics yang dapat dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi antara Lain :

(1) kejujuran; (2) obyektif; (3) menghargai data dan fakta; (4) menghargai rasionalitas; (5) berpikiran terbuka; (6) kreatif; dan (7) mampu membangun diri

B. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMA/SMK

Strategi dan implementasi satuan pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Perlu komitmen bersama untuk melakukan Pendidikan Antikorupsi.
2. Pendidikan karekter bangsa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, jangan sampai berhenti kalau ganti pimpinan.
3. Pemerintah membuat pedoman tentang pendidikan karekter bangsa untuk setiap satuan pendidikan, baik formal, nonformal dan informal.
4. Setiap satuan pendidikan perlu memahami esensi pendidikan karekter bangsa.
5. Perlu ada kesinambungan, sinergi, dan kerja sama dalam implementasi pendidikan antikorupsi pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan pendidikan perlu mengembangkan nilai-nilai etik dan budaya sekolah dalam bentuk perilaku.
7. Pemerintah melakukan advokasi terhadap tayangan di media.
8. Membuat iklan masyarakat tentang pendidikan karakter bangsa.

C. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Strategi dan implementasi satuan pembelajaran dapat dilakukan dalam dua tataran, yaitu sebagai berikut .

Strategi Makro Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat)

1. Perlu komitmen dari seluruh jajaran pendidikan di Perguruan Tinggi, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi;
2. Penerapan Pendidikan Antikorupsi dari pendidikan dasar, menengah dan PT perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Perlu *rule of conduct* Pendidikan Antikorupsi yang disepakati berbagai pihak dan dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan;
4. Perlu dukungan pemerintah yang nyata terhadap perguruan tinggi dalam pelaksanaan Pendidikan Anti-korupsi. Dengan memasukkan Pendidikan Antikorupsi bangsa ke dalam rencana strategi perguruan tinggi;

Strategi Mikro Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

1. hakikat Pendidikan Antikorupsi di setiap PT: pengasahan *inner capacity* (*Moral Knowing, Moral Feeling, Moral Action*)
2. pendekatan: Penanaman Nilai, Perkembangan Kognitif, Analisis Nilai, Klarifikasi Nilai, Pembelajaran Berbuat (dialog, diskusi, *problem solving*, dan berbagai pengalaman dan penemuan).
3. *ciri kurikulum*: keterpaduan (kognitif, afektif, psikomotor), kesinambungan dan holistic (*continuity, holistic, sustainability*), sinkronisasi (antar dosen, manajemen PT, mahasiswa, masyarakat sekitar, dan orang tua).
4. SDM : perlu dibangun keteladanan dari dosen, pimpinan, serta civitas akademika lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, sebagai contoh konkret dan membangun konsistensi sikap dan perilaku dan utamakan pemberdayaan dosen dan pimpinan perguruan tinggi dalam hal pengetahuan dan keterampilan tentang Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dengan bidang ilmu (pendidikan, penelitian, pelatihan, sarasehan, forum dosen, dialog interaktif dan diskusi ilmiah).

D. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Masyarakat

1. Semua lembaga pendidikan nonformal perlu menanamkan dan mengimplementasikan kembali konsep dan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi baik yang bersumber dari ideology negara (Pancasila), agama, adat istiadat setempat yang relevan, maupun norma susila lainnya.
2. Perlu memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi, seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), berbagai kursus dan pelatihan keterampilan dengan berbasis pada pengelolaan kearifan budaya masing-masing daerah.
3. Perlu memberikan pembiayaan operasional PKBM melalui APBN atau program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan, agar strategi dan implementasi Pendidikan

Antikorupsi dapat disosialisasikan dan dibudayakan lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai moral (*integrated curriculum*) ke dalam perilaku yang berkarakter dan humanistik. Pendidikan antikorupsi dapat didesain dan diimplementasi dalam satuan pembelajaran mulai tingkat SMA, sampai ke perguruan tinggi dengan strategi dan metode yang terukur. Kekhasan pendidikan antikorupsi ialah dapat menghasilkan anak bangsa yang jujur boleh jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang teregister sebagai bangsa paling “bersih”. Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pilar utama pendidikan yaitu: sekolah, orang tua, dan masyarakat serta pihak swasta dalam membangun karakter jujur dan membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
- Masrukhi. 2009. “Revitalisasi Pendidikan IPS sebagai Instrumen Integrasi Nasional”. Dalam *Integrasi Sosial dalam Bermasyarakat majemuk pada Era Global*. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Nata, Abuddin .2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Grassindo
- Supriyatno, 2001. “Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Kecenderungan Impotensi Ditinjau dari Tingkat Pendidikan”. Skripsi S1. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945.
- Thompson, James.1993. *Developing Education*. Toronto: NewGrace.inc *Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Zulnaidi. 2007. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas Sumatera Utara.